
THE INFLUENCE OF INFLATION, GRDP, AND MSE ON UNEMPLOYMENT RATE IN CENTRAL JAVA PROVINCE 2017-2019

Ahmad Ulil Albab Al Umar^{1*}, Lora Lorenza², Anava Salsa Nur Savitri³, Heni Widayanti⁴, Muammar Taufiqi Lutfi Mustofa⁵.

¹Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga

Email : ahmadulil.asfebi@gmail.com

²Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga

Email : loralorenza.psfebi@gmail.com

³Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga

Email : anavasalsa@gmail.com

⁴Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga

Email : heniwidayanti.asfebi.69@gmail.com

⁵Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga

Email : taufiqi.febi@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of inflation, PDRB, and UMK on the unemployment rate in Central Java Province. This research is quantitative research. Data analysis in this study uses multiple linear regression with EViews 10. The population in this study is all districts and cities in Central Java Province periods 2017-2019. The sample in this study was 35 districts and cities in Central Java Province. The data used in this research is secondary data from Badan Pusat Statistik. The results in this study showed that inflation and UMK have a negative and not significant effect on the unemployment rate in Central Java Province. While PDRB has a negative and significant effect on the unemployment rate in Central Java. Based on the F test variable inflation, PDRB and UMK simultaneously have a significant effect on the unemployment rate in Central Java Province. Based on the test results the coefficient of determination or R square obtained 0.864915, this shows that the percentage influence of the variable inflation, PDRB, and UMK on the variable unemployment rate of 86.4%

Keyword: Unemployment Rate, Inflation, PDRB, UMK.

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, PDRB dan UMK terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan EViews 10. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019. Sampel dalam penelitian ini ialah 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi dan UMK berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan PDRB berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Jawa Tengah. Berdasarkan uji F variable inflasi, PDRB dan UMK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi atau R square diperoleh 0,864915 hal ini menunjukkan bahwa presentase pengaruh variable inflasi, PDRB dan UMK terhadap variable tingkat pengangguran sebesar 86,4%.

Kata Kunci : Tingkat Pengangguran, Inflasi, PDRB, UMK

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dimana negara ini terdiri dari berbagai suku, budaya, Bahasa dan berbentuk kepulauan. Indonesia tak lepas dari berbagai permasalahan nasional, salah satunya karena terdapat ketimpangan sosial. Hal ini menjadi momok bagi negara, karena akan berdampak pada kemajuan bangsa ini. Bila mana sumber daya manusia yang didalamnya tidak jalankan dengan baik maka akan ketimpangan antar manusia. karena masalah kecil, seperti tidak bisa kerja sebab banyaknya persaingan, upah yang sedikit, karena dirinya menganggap miskin, maka hal ini akan menjadikan banyak pengangguran, yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan dalam proses perekonomian suatu negara. Pengangguran yang jumlahnya mengalami peningkatan tiap tahun itu juga akan terjadi keburukan didaerahnya karena negara tersebut kekurangan sumberdaya manusia yang produktif dan tidak dapat berinovasi dengan baik.

Di Jawa Tengah sendiri khususnya, pengangguran di provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu kendala yang besar yang dihadapi. Akan tetapi, bila mana bisa menjadikan dari tiap-tiap daerah itu dari tahun ke tahun prosentasenya meningkat dengan baik, dalam artian produktivitas yang dihasilkan semakin bertambah maka hal tersebut akan bisa mengubah pengangguran ditingkat provinsi menjadi lebih baik. Dalam hal ini menurut data dari BPS dijelaskan bahwa tingkat pengangguran yang ada di Jawa Tengah tergolong rendah karena prosentase yang ada di Jawa Tengah sendiri pada tahun 2019 sebesar 4,49 %. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan dari presentase pengangguran pada tingkat nasional pada bulan Agustus 2019 yang mencapai 5,28 %.

Tabel 1. Presentase Pengangguran di Jawa Tengah

Tahun	Tingkat pengangguran
2017	4,59%
2018	4,48%
2019	4,49%

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Masalah pengangguran saat ini terjadi apabila jumlah dari penduduk tiap tahun itu bakalan naik, maka hal ini akan menjadikan tidak seimbang dalam dunia kerja karena jumlah penduduk yang ada itu tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan, hal ini akan berpengaruh pada GDP. GDP itu sendiri adalah produk nasional yang diwujudkan oleh faktor produksi di suatu negara dan pertumbuhan ekonomi dengan GDP yang meningkat, diharapkan akan dapat menyerap tenaga kerja ataupun sebaliknya bila mana GDP mengalami penurunan itu berarti terdapat banyak pengangguran (Sarimuda Tengkoek, 2014).

Dalam hal ini GDB itu mengatur secara nasional tetapi apa yang akan saya bahas itu mengerucut kedalam wilayah jawa tengah yaitu mengarah kepada UMK (upah minimum kabupaten atau Kota). Yang mana ini akan mengacu kepada pengaruh UMK terhadap pengangguran yang ada di wilayah tersebut. Ketika UMK itu tinggi maka pengangguran itu akan berkurang, Hal ini disebabkan karena pendapatan itu naik maka orang-orang akan berebutan untuk cari pekerjaan, namun apabila UMK ini rendah maka orang yang akan bekerja pun akan malas karena pendapatan mereka berkurang, sehingga beban hidupnya jadi bertambah.

Adapun UMK yang ada di Jawa Tengah sendiri relatif berbeda antara satu dengan yang lainya itu disebabkan karena tingkat propduktivitas yang ada pada wilayah tersebut juga berbeda. Apabila tingkat produktivitas dalam wilayah tersebut mengalami kenaikan maka UMK yang ada diwilayah tersebut juga akan naik, begitu juga sebaliknya. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sendiri merupakan nilai total dari hasil UMK yang mana bila antar kabupaten tersebut terdapat suatu pendapatan yang diperoleh dari barang dan jasa, maka selanjutnya adalah mengumpulkan hasil pendapatan tersebut kemudian dihitung perwilayah sehingga kita bisa tahu berapa tingkat keseluruhan pendapatan dalam suatu wilayah. Maka ketika terdapat nilai PDRB yang menurun maka akan terjadi suatu

perekonomian yang buruk dan itu mengarah kepada Inflasi.

(Prayuda & Dewi, 2015) mengatakan bahwa Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran. Sedangkan menurut (Panjawa, 2014) mengatakan bahwa Inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di kota Medan. Menurut (Laksamana, 2016) mengatakan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran Kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Sedangkan menurut (Yanti & Adda, 2017) mengatakan bahwa PDRB tidak berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Sulawesi. Menurut (Kurniawan, 2013) mengatakan bahwa UMK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka. Sedangkan menurut (Priastivi & Handayani, 2019) mengatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Inflasi, PDRB, dan UMK Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019”**.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengangguran

Pengangguran menurut (Byrne dan Strobl, 2004) adalah suatu kondisi ketika individu yang telah memasuki kategori usia kerja dalam periode tertentu namun individu tersebut belum memiliki pekerjaan, tidak bekerja, atau sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja hal ini juga telah disampaikan oleh *International Labour Organisation*. Seseorang yang masuk kedalam kategori pekerja ialah seseorang yang telah memiliki pekerjaan kurang lebih selama satu minggu dan telah mendapatkan upah atau gaji dari

pekerjaan tersebut. Berbanding terbalik dengan pengangguran atau seseorang yang tidak bekerja karena tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang menanti panggilan kerja. Dalam makna lain, pengangguran ialah individu yang tidak atau belum memiliki peran dalam proses produksi barang dan jasa dalam periode tertentu (mankiw,2018).

Permasalahan pengangguran sering terjadi karena tidak adanya keseimbangan di pasar tenaga kerja, hal tersebut terjadi ketika jumlah penawaran untuk tenaga kerja lebih tinggi di bandingkan dengan jumlah permintaan yang dibutuhkan oleh tenaga kerja atau individu yang belum memiliki pekerjaan. Sehingga mengakibatkan adanya misalokasi tenaga kerja ya adanya tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan dan akhirnya menganggur.

Inflasi

Inflasi menurut (McEachern, 2000:133) adalah peristiwa kenaikan yang terus menerus terjadi pada rata-rata tingkatan harga suatu perekonomian dan mengakibatkan adanya kenaikan permintaan agregat. *Demand-pull inflation* (inflasi karena ditarik permintaan) merupakan peristiwa Inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan permintaan agregat, sedangkan *cost-push inflation* ialah peristiwa ketika inflasi mengalami penurunan penawaran agregat.

Para ekonom telah mencoba membangun hubungan antara inflasi dan pengangguran. Karena, Kedua variabel ini saling terkait secara ekonomi namun hubungan yang ada di antara mereka berkorelasi terbalik. Menurut penelitian (Prayuda & Dewi, 2015) mengatakan bahwa Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran. Sedangkan menurut (Panjawa, 2014) mengatakan bahwa

Inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di kota Medan. Hal ini didukung oleh Philips (1958) dalam Mankiw (2003:436) mereka menggambarkan bagaimana hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran dengan asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan bertambahnya permintaan agregat, akan berkesinambungan dengan teori permintaan yaitu jika permintaan naik maka harga akan naik. Tingginya harga inflasi tersebut maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen akan meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Dengan demikian hipotesis yang diajukan:

H₁ : Inflasi berpengaruh terhadap Pengangguran.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah akan terus berkesinambungan mengikuti pola tertentu berdasarkan hasil kajian yang selektif terhadap situasi dan kondisi. Pembangunan yang merata dan dilaksanakan secara tuntas perlu dijalankan, sehingga target pembangunan yang optimal akan tercapai. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator kinerja yang menggambarkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai, khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini penting bagi daerah, karena dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, maupun sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan di masa yang akan datang.

Tinggi rendahnya output ialah salah satu parameter pengukur kesejahteraan masyarakat suatu daerah, hal ini dikarenakan besarnya PDRB akan berbading lurus dengan produktifitas suatu daerah. Output yang berpegaruh terhadap produksi dapat dijabarkan melalui fungsi produksi CobbDouglass yaitu

$$Y = AK^{\frac{1}{3}}L^{\frac{2}{3}}$$

Variabel Y merupakan besaran output, A mewakili ketersediaan teknologi, K (jumlah modal), dan L (tenaga kerja) (Mankiw, 2018). Fungsi tersebut menjelaskan bahwa output akan berbanding lurus terhadap jumlah tenaga kerja, sehingga ketika output naik maka daya serap tenaga kerja juga akan meningkat, hal ini kemudian akan berdampak pada turunnya angka pengangguran. Adanya peran output dalam menekan angka pengangguran seperti yang dijelaskan dalam fungsi produksi didukung oleh teori yang dicetuskan oleh Arthur Melvin Okun (Okun's Law), ia meyakini bahwa pertumbuhan PDRB sebesar 3 persen akan menekan angka pengangguran sebesar 1 persen (Elshamy, 2013). Teori ini menjelaskan bahwa PDRB berpengaruh negatif terhadap pengangguran, sehingga ketika angka PDRB naik maka angka pengangguran akan turun, begitu pula sebaliknya. Hal ini sependapat dengan (Laksamana, 2016) mengatakan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran Kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Sedangkan menurut (Yanti & Adda, 2017) mengatakan bahwa PDRB tidak berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Sulawesi. Dengan demikian hipotesis yang diajukan:

H₂: PDRB berpengaruh terhadap Pengangguran.

UMK (Upah Minimum Kota atau Kabupaten)

Upah ialah suatu balas jasa yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi terhadap pekerja yang jumlahnya telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak. Upah ditentukan berdasarkan upah minimum regional yang terdiri dari upah minimum berdasarkan wilayah dan berdasarkan sektor pada provinsi atau kabupaten (kota). Upah dibedakan menjadi dua yaitu: upah minimal (sejumlah upah yang diterima) dan upah riil (jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan upah uang itu). Menurut Gilarso (2007:150) Upah secara singkat berarti khusus dipakai untuk tenaga kerja yang bekerja pada orang lain dalam hubungan kerja (sebagai karyawan atau buruh). Upah minimum adalah suatu standar minimal yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerja. Upah minimum yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Ini merupakan suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu.

Upah juga akan selalu berdampak pada tingkat kesempatan kerja dan pengangguran, dengan penerapan upah minimum di tiap Kabupaten/Kota justru akan mengurangi tingkat permintaan tenaga kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pengangguran. Menurut Gilarso (2007:147) Penerapan upah minimum, terkhusus untuk negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak seperti Indonesia akan mengakibatkan penambahan pengangguran. Pengangguran akan

terjadi pada generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan dan berusaha mencari kerja sesuai dengan keinginan mereka. Keinginan mereka bekerja di sektor modern atau di kantor dan dengan upah yang cukup tinggi. Untuk mendapatkan kesempatan itu mereka bersedia menunggu dalam waktu yang lama. Hal ini lah yang menyebabkan kecenderungan tingginya angka pengangguran. Hal tersebut didukung pula oleh (Kurniawan, 2013) yang mengatakan bahwa UMK memilih pengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka. Sedangkan menurut (Priastiwi & Handayani, 2019) mengatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka Dengan demikian hipotesis yang diajukan:

H_3 : UMK berpengaruh terhadap Pengangguran.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Sampel dalam penelitian ini ialah 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Tahun dalam penelitian ini ialah antara tahun 2017-2019. Analisis data dalam penelitian ini ialah menggunakan regresi linear berganda menggunakan EViews 10. Data dalam penelitian ini ialah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data panel (*Pooled Data*). Menurut (Gujarati, 2006) menyatakan bahwa data panel tidak harus dilakukan uji asumsi klasik karena data ini data istimewa dimana merupakan gabungan dari data *cross section* dan *time series*.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini ialah tingkat pengangguran yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diukur dengan satuan persen.

Variabel Independen

- a. Inflasi
 Inflasi diperoleh dari nilai IHK Badan Pusat Statistik (BPS) yang diukur dengan satuan persen.

- b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) diukur dengan satuan persen.
- c. Upah Minimum Kota atau Kabupaten (UMK)
 Diperoleh dari UMK yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) pertahun 2015-2018 satuan juta rupiah

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

	INFLASI	PDRB	UMK	PENGANGGURAN
Mean	3.167524	5.375143	1686176.	4.493143
Median	3.080000	5.520000	1661632.	4.210000
Maximum	4.560000	6.860000	2498587.	8.450000
Minimum	2.160000	2.330000	1370000.	1.780000
Std. Dev.	0.540925	0.776084	203925.3	1.639861
Skewness	0.418390	-2.171919	1.190705	0.699138
Kurtosis	2.663424	8.328116	5.099334	2.656336
Jarque-Bera	3.558988	206.7526	44.09265	9.070613
Probability	0.168724	0.000000	0.000000	0.010724
Sum	332.5900	564.3900	1.77E+08	471.7800
Sum Sq. Dev.	30.43036	62.63982	4.32E+12	279.6711
Observations	105	105	105	105

Sumber : Data Diolah, 20

Hasil statistik deskriptif pada table 2 menunjukkan bahwa dari tahun 2017-2019 tingkat pengangguran mempunyai nilai minimum sebesar 4,493143 dengan standar deviasi sebesar 1,780000. Hal ini berarti bahwa kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat pengangguran rata-rata sebesar 4,49 persen artinya terdapat 4,49 orang pengangguran dari 100 orang angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah hal ini juga berarti bahwa

1,780000 dan nilai maksimum sebesar 8,450000. Adapun rata-rata pengangguran sebesar kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tak lepas dari masalah pengangguran.

Pada hasil uji statistik deskriptif diatas inflasi, PDRB dan UMK memiliki nilai minimum 2,160000, 2,330000, dan 1370000. Adapun rata-rata nilai inflasi, PDRB dan UMK ialah 3,167524,

5,375143, dan 1686176 dengan standar deviasi masing-masing sebesar 0,5409925, 0,776084, dan 203925,3. Kemudian untuk nilai maksimum sebesar 4,560000, 6,860000, dan 2498587. Hal tersebut berarti bahwa tingkat inflasi di Provinsi Jawa Tengah minimum sebesar 2,16% kemudian untuk rata-ratanya sebesar 3,16% dan maksimal 4,56%, kemudian PDRB di Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai minimum sebesar 2,33%, dan rata-rata 5,37% dan juga memiliki tingkat PDRB maksimal yaitu sebesar 6,86% di daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Kemudian untuk UMK di Jawa Tengah memiliki upah minimum sebesar Rp 1.370.000 dan rata-rata sebesar Rp

1.686.176 kemudian upah minimum tertinggi sebesar Rp 2.498.587 yaitu UMK di Kota Semarang.

Regresi Linier Berganda

Sebelum melakukan uji regresi terlebih dahulu harus melakukan uji kecocokan model regresi dengan metode sebagai berikut :

Uji Regresi Model Fixed Effect

Pengujian ini untuk menentukan model yang terbaik antara *fixed effect* atau *common effect*. Uji yang digunakan adalah uji chow menggunakan uji F dengan taraf uji 5%. Uji chow dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

Ho : model *common effect*

Ha : model *fixed effect*

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	18.497261	(35,66)	0.0000
Cross-section Chi-square	249.941297	35	0.0000

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji chow diatas didapat nilai Prob Cross-section F dan Chi-square sebesar $0,0000 < 0,05$ atau 5%. Hal ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima.

Uji Regresi Model Fixed Effect atau Random Effect

Pengujian ini untuk memilih antara model *fixed effect* atau *random effect*. Uji yang digunakan adalah uji hausman yang menggunakan uji H dengan taraf 5%. Hipotesis dari uji hausman adalah sebagai berikut :

Ho : model *random effect*

Ha : model *fixed effect*

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Equation: Untitled
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.104786	3	0.0439

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan uji hausman didapat nilai Prob Cross-section random sebesar $0,0439 < 0,05$ atau 5%. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga model terbaik adalah model *fixed effect*. Maka uji Lagrange Multiplier (LM) tidak **Uji Statistik Persamaan**

perlu dilakukan karena pada uji Chow model *fixed effect* yang terbaik. Uji chow menunjukkan model *fixed effect* yang terbaik dan uji hausman juga menyatakan model *fixed effect* yang terbaik, maka tidak perlu uji Lagrange Multiplier (L

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: PENGANGGURAN
Method: Panel Least Squares
Date: 03/26/20 Time: 18:28
Sample: 2017 2019
Periods included: 3
Cross-sections included: 36
Total panel (unbalanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.822101	1.506718	5.855179	0.0000
INFLASI	-0.175845	0.160391	-1.096348	0.2769
PDRB	-0.553325	0.209964	-2.635337	0.0105
UMK	-4.73E-07	6.14E-07	-0.770238	0.4439

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.914273	Mean dependent var	4.493143
Adjusted R-squared	0.864915	S.D. dependent var	1.639861
S.E. of regression	0.602712	Akaike info criterion	2.103798
Sum squared resid	23.97529	Schwarz criterion	3.089554
Log likelihood	-71.44937	Hannan-Quinn criter.	2.503246
F-statistic	18.52337	Durbin-Watson stat	2.525246
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan table diatas didapat model estimasi persamaa regresi *fixed effect model* sebagai berikut :

$$Y = 8,822101 - 0,175845\text{inflasi} - 0,553325\text{pdrb} - 4,73\text{E-}07\text{umk}$$

Interpretasi persamaan diatas ialah sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 8,822101 yang berarti bahwa apabila variable inflasi, PDRB dan UMK bernilai

konstan (nol) maka pengangguran di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,82 %.

2. Nilai Koefisien regresi variable inflasi sebesar -0,175845 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1% inflasi maka pengangguran di Provinsi Jawa Tengah akan menurun sebesar 0,17 %.

3. Nilai Koefisien regresi variable PDRB sebesar $-0,553325$ yang berarti bahwa setiap kenaikan 1% PDRB maka pengangguran di Provinsi Jawa Tengah akan menurun sebesar 0,55 %.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji variable independent secara simultan berpengaruh terhadap variable dependen. Berdasarkan table 4 hasil uji tadi diperoleh nilai Prob F statistic

Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji apakah variable independent secara

4. Nilai koefisien regresi variable UMK sebesar $-4,07E-07$ yang berarti bahwa setiap kenaikan 1% UMK maka pengangguran di Provinsi Jawa Tengah akan menurun sebesar 4,07%.

sebesar $0,00000 < 0,05$ atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variable inflasi, PDRB dan UMK berpengaruh simultan terhadap variable tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah.

parsial berpengaruh terhadap variable dependen

Tabel 6. Nilai Prob t

Variabel	Prob	Keterangan
Inflasi	0,2769	Tidak signifikan
PDRB	0,0105	Signifikan
UMK	0,4439	Tidak signifikan

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa variable inflasi dan UMK tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah sehingga H1 dan H3 ditolak. Sedangkan variable PDRB berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah sehingga H2 diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan table 5 diperoleh nilai Adjusted R-Square sebesar 0,864915. Hal ini berarti bahwa 86,4% tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh variable inflasi, PDRB dan UMK. Sedangkan 13,6% dijelaskan oleh faktor lain.

Pembahasan

Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran

Hasil Penelitian menunjukan bahwa variabel Inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat

pengangguran diprovinsi Jawa Tengah dengan koefisien bernilai negative. Secara teori ini pernah dijelaskan oleh Philips (1958) tentang hukum Philips yang menyatakan bahwa terjadi hubungan negative antara inflasi dan pengangguran. Ketika salah satu diantaranya meningkat, maka satu yang lainnya akan turun.

Teori Philips ini mengasumsikan bahwa inflasi meningkat karena adanya naiknya permintaan agregat. Tingginya permintaan akan berakibat harga barang naik dan stok barang berkurang. Untuk memenuhi permintaan pasar tersebut produsen akan menambah kapasitas produksi dengan cara menambah tenaga kerja. Semakin tingginya permintaan akan tenaga kerja tersebut pengangguran cenderung semakin rendah. Dalam teori pphilips ini tidak dimungkinkan menurunkan keduanya Bersama-sama.

Pengaruh yang tidak signifikan Inflasi terhadap pengangguran di provinsi Jawa Tengah dikarenakan tidak disebabkan oleh terjadinya peningkatan permintaan agregat yang bermultiplier efek terhadap penyerapan tenaga kerja yang akhirnya mengurangi tingkat pengangguran. Namun tingkat inflasi disebabkan oleh beberapa faktor seperti kenaikan bahan pangan, kenaikan alat transportasi, gagal panen karena cuaca tidak menentu, kenaikan harga-harga barang dan jasa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Panjawa, 2014) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Medan. Kesimpulannya teori Philips yang menyatakan hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran memiliki hubungan negative dapat dibuktikan dalam teori ini.

Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Pengangguran

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable PDRB berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai koefisien bernilai negatif. Hubungan PDRB dengan pengangguran dijelaskan oleh Hukum Okun. Teori Hukum Okun mengatakan ada hubungan negative antara PDRB dan pengangguran. Hukum Okun ini digunakan oleh negara berkembang sebagai solusi untuk mengatasi masalah pengangguran. Dengan menaikkan PDRB akan meningkatkan jumlah lapangan kerja, sehingga menyerap pengangguran. Jika terjadi peningkatan PDRB, maka menyebabkan permintaan tenaga kerja naik dan pengangguran akan turun. Sebaliknya, jika PDRB turun akan menyebabkan produsen mengurangi produksi sehingga mengurangi tenaga kerja yang berakibat pengangguran akan meningkat.

Pengaruh yang signifikan antara variable PDRB terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah ini disebabkan karena sudah optimalnya sasaran ekonomi di Jawa Tengah sehingga ketimpangan antara wilayah kota dengan pedesaan di Jawa Tengah tidak terlalu berbeda. Banyaknya industri-industri di Jawa Tengah membuat banyak lapangan pekerjaan sehingga tenaga kerja di Jawa Tengah terserap. Industri di Jawa Tengah banyak pada industri manufaktur hal ini menjadi penyumbang tertinggi PDRB di Jawa Tengah dan industri pada bidang inilah yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga menimbulkan pengaruh signifikan terhadap angkatan kerja di Jawa Tengah sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Yanti & Adda, 2017) yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh negative terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 1993 sampai 2009. Hal ini berarti meningkatnya PDRB diikuti dengan menurunnya tingkat pengangguran.

Upah Minimum Kota/Kabupaten Terhadap Tingkat Pengangguran

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable UMK tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai koefisien bernilai negatif. Hubungan upah minimum dengan pengangguran yaitu tenaga kerja menetapkan upah minimumnya. Jika upah minimum itu tidak sesuai maka pekerja akan menolaknya dan menyebabkan terjadinya pengangguran. Jika upah disuatu daerah terlalu rendah, maka jumlah pengangguran akan meningkat. Upah di Provinsi Jawa Tengah cenderung stabil namun tidak begitu besar. Hal inilah yang mengakibatkan di Provinsi Jawa Tengah masih banyak pengangguran karena

mereka memandang upah sebagai hasil dari pekerjaan mereka. Upah yang tinggi akan menarik para tenaga kerja untuk bekerja begitu sebaliknya, jika upah terlalu rendah tenaga kerja akan cenderung tidak tertarik untuk bekerja. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan (Priastiwi & Handayani, 2019) mengatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal ini berarti bahwa meningkatnya upah akan menurunkan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah.

5. KESIMPULAN

1. Inflasi berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019.
2. PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019.
3. UMK berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019.
4. Inflasi, PDRB dan UMK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah.

6. REFERENSI

Badan Pusat Statistik. (2020, Maret 26). Retrieved from BPS: www.jateng.bps.go.id

Ghozali, I. (2017). *ANALISIS MULTIVARIAT DAN EKONOMETRIKA EIEWS 11*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, D. N. (2006). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Hajji, M. S., & SBM, N. (2013). *ANALISIS PDRB, INFLASI,*

UPAH MINIMUM PROVINSI, DAN ANGKA MELEK HURUF TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 1990-2011. DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS, 1-10.

Indradewa, I. G., & Natha, K. S. (2015). *PENGARUH INFLASI, PDRB DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI BALI. E--Jurnal UNUD*, 923-950.

Kurniawan, R. (2013). Analisis Pengaruh PDRB, UMK, dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang Tahun 1980-2011. 1-24.

Laksamana, R. (2016). Pengaruh PDRB Terhadap Pengangguran di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat. *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, 111-134.

Panjawa, J. S. (2014). Efek Peningkatan Upah Minimum Terhadap Pengangguran. *Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 48-58.

Panorama, M. d. (2017). Pengaruh Upah Minimum Kota (UMK) Terhadap Kesempatan Kerja dan Pengangguran di Kota Palembang Tahun 2004-2014. *I-Finance*, 141-161.

Prayuda, M., & Dewi, M. (2015). Pengaruh Inflasi dan Investasi Terhadap Pengangguran di Provinsi Bali Tahun 1994-2013. *E-Journal EP Unud*, 69-95.

Priastiwi, D., & Handayani, H. (2019). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi

- Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Economics*, 159-169.
- RB, T. S., & Soekarnoto. (2014). PENGARUH PDRB, UMK, INFLASI, DAN INVESTASI TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA DI KAB/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007 - 2011. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 106-119.
- Romadhoni, P., Faizah, D. Z., & Afifah, N. (2018). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Matematika Integratif*, 115-121.
- Safitri, D. (2011). Pengaruh Inflasi dan PDRB Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah 1993-2009. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 106-120.
- Sembiring, V. B., & Sasongko, G. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran di Indonesia Periode 2011 – 2011. *International Journal of Social Science and Business*, 430-443.
- Soekarnoto, T. (2014). Pengaruh PDRB, UMK, Inflasi dan Investasi Terhadap Pengangguran Terbuka di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 106-120.
- Yacoub, Y., & Firdayanti, M. (2019). Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding SATIESP 2019*, (pp. 132-142).
- Yanti, N., & Adda, H. (2017). Analisis Pengaruh Inflasi, Investasi, dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran di Wilayah Sulawesi Periode 2010-2014. *e Jurnal Katalogis*, 138-149.